

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

**Diajukan Untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

Nezzi Amerta Saputri

NPM : 1621020104

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

**Diajukan Untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas
Syariah**

Oleh:

**NEZZI AMERTA SAPUTRI
NPM : 1621020104**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Tanggung jawab adalah yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah menjadi tugas serta kewajiban yang harus dijalankan. Sedangkan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tetapi ada beberapa macam masalah dalam fakir miskin dan anak terlantar ini meliputi beberapa hal seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan, mungkin ada juga karena faktor keluarga nya yang tidak harmonis (*broken home*) dan segala sesuatu yang terkadang menjadi kebutuhan pokok anak. Sehingga anak-anak tersebut terlintas di benak pikirannya untuk menjadi anak jalanan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka serta untuk menghilangkan beban pikiran terkadang mereka tidak pulang kerumah karena faktor keluarga nya yang tidak lagi harmonis. Mereka yang sering kita jumpai juga anak-anak kita lihat saja di jalanan ada yang sedang mengamen bahkan ada juga yang seperti meminta-minta (mengemis). Fakir menurut maliki ialah orang yang sangat sengsara hidupnya. Ketika kita berbicara tentang pemeliharaan negara juga mempunyai sesuatu yang mesti terpelihara. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar dan yang kedua bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*) yang Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif Dengan pendekatan berfikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.dengan menggunakan penelaah terhadap buku-buku,literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang di dapat, bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut siyasah Islam ialah dimana dalam tanggung jawab dalam islam harus sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Hadits. Siyasah Islam dimana pada prinsipnya mengendalikan kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.demi kepentingan tanggung jawab yang telah diberikan harus dijalankan dengan amanah agar terciptanya kedamaian, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu bersifat universal harus dapat mewarnai kehidupan bangsa kita ini. Sedangkan tanggung jawab fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif sendiri yang mendasar tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah berlaku seperti a. menentukan garis kebijaksanaan yang di perlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan social b. memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab social masyarakat; c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan social

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nezzi amerta saputri
NPM : 1621020104
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah
f

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 20 November 2019
Penulis,

Nama: Nezzi Amerta Saputri
Npm :1621020104



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
TERHADAP PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR PERPSEKTIF FQIH
SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

Nama Mahasiswa : Nezzi Amerta Saputri

NPM : 1621020104

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

**Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003**

Pembimbing II

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**

Ketua Jurusan

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “ ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
TERHADAP PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF “ Disusun Oleh :
Nezzi Amerta Saputri NPM : 1621020104 Program Studi : Siyasa
Syar'iyah. Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal :**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Frenki, M.Si.

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



**Mengetahui
Dehan fakultas**

**Dr. M Khoiruddin, M.H.
NPM.196210221993031002**

MOTTO

يٰۤاٰدُرُّدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

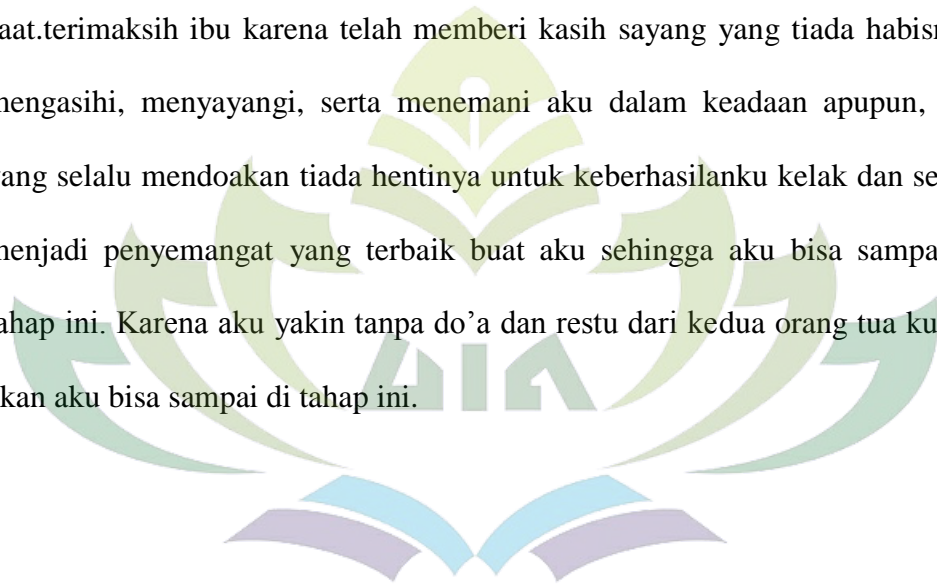
(QS. Shad 23 : 26)

PERSEMBAHAN

Secara karya kecilku ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda tersayang dan tercinta Nizar Zaini yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.

Ibuku tercinta Sriyanti tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat.terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tua ku tak akan aku bisa sampai di tahap ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nezzi Amerta Saputri dilahirkan di Bumi Dipasena Agung Tulang Bawang pada tanggal 10 maret 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara putri pasangan Bapak Nizar Zaini dan Ibu Sriyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Makmur, Tulang Bawang di selesaikan tahun 2002.
2. SDN 1 bumi Dipasena Makmur, Tulang Bawang di selesaikan tahun 2010.
3. SMPN 2 Rawajitu Timur, Tulang Bawang di selesaikan tahun 2013.
4. Kemudian melanjutkan SMA YADIKA Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016.
5. Tahun 2016, Penulis di terima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Siyasah (` Hukum Tata Negara) Melalui Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasioal (SPAN).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positive" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag , selaku Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Frenki, S.E.,M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Dr. Maimun, S.H.,M.A.,selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Khoiruddin, M.S.I.,selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ahkhususnya Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
10. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
11. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka di setiap sujudnya.
12. Untuk Adiku tercinta Rifan Nizyan Saputra dan Nidha Febria Saputri yang selalu memberi semangat untuk agar kelak dapat menjadi contoh untuk mereka berdua yang selalu menjadi penyemangat dalam proses ini.
13. Saudara-saudaraku, pamanku Amuri Alpa yang sudah membantu dalam proses skripsi ini, buat paman ku Ayah Musni , bapak Walidi, yang selalu menasehati aku selama masa kuliah ini dan selalu mengawasiku ketika aku jauh dari orangtua , untuk bibiku Lati Tati Puspita Sari yang telah banyak membantu dan mendengarkan segala keluhan kesah selama menyelesaikan skripsi ini tak lupa untuk Lita Haini bibi yang tidak

pernah bosan memberikan gambaran-gambaran serta motivasi terhadap aku agar dapat menyelesaikan kuliah ini.

14. Almarhum nenek Khasiah dan nenek Mardiahdan kakek almarhum Syamsudin dan H. Zaini yang sempat memberikan kasih sayangnya pada saat aku masih kecil.
15. Teman dekatku yang telah membantuku dalam menyelesaikan karya ini Riyan Dani Anjarsari, Fikri Thia Naufal, Ismelia Fatonah, Aji Jumandar Endang Sri Yunita, Ita Purnama Sari, Windari, Shelvia Novianti, Rhman Arif.
16. Teman-temanku Anggas, Dika, Tite, Shinta ,Dede, Nela, Roy, Shelvi, Winda, Ken yang telah memberikan sedikit pengalaman selama kami KKN di Desa Margoyoso pada tahun 2016, Kecamatan Sumber Rejo, Tanggamus..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Amin

Bandar Lampung, November 2019
Penulis

Nezzi Amerta Saputri

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYATHIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Fokus Penelitian | 8 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| G. Signifansi/ Manfaat Penelitian | 9 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TEORI UMUM FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR | |
| a. KAJIAN TEORI | |
| 1. Fakir Miskin | |
| a. Pengertian Fakir Miskin | 13 |
| b. Perbedaan Makna Fakir dan Miskin..... | 15 |
| c. Ciri-ciri Kemiskinan..... | 17 |
| d. Faktor –faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan..... | 18 |
| e. Pekerja Sosial dan Kemiskinan | 25 |
| f. Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan..... | 25 |
| 2. AnakTerlantar | |
| a. Pengertian Anak..... | 33 |
| b. Pengertian Anak Terlantar | 33 |
| c. Ciri-ciri Anak Terlantar..... | 34 |
| d. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Anak Terlantar..... | 35 |
| 3. Anak Jalanan | |
| a. Pengertian Anak Jalanan | 37 |
| b. Anak jalanan | 39 |
| c. Problem Kehidupan Anak Jalanan | 40 |

| | |
|--|----|
| b. TINJAUAN PUSTAKA | 43 |
| BAB III PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTARDALAM KONSEP FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF | |
| A. Menurut Konsep Fiqh Siyasah | |
| 1. Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar..... | 46 |
| 2. Tanggung Jawab Menurut Fiqh Siyasah | 51 |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum Tata Pemerintahan | 53 |
| B. Konsep Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut Hukum Positif | |
| 1. Macam –Macam Konsep dalam Kemiskinan | 57 |
| 2. Akibat Hukum Perceraian Dalam Anak | 59 |
| 3. Pemeliharaan dan Perlindungan Anak | 63 |
| 4. Upaya yang Dilakukan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Anak | 64 |
| 5. Hak- Hak Anak | 70 |
| 6. Kewajiban Tanggung Jawab Negara, Pemerintah Dan Masyarakat | 74 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Pandangan Fiqh Siyasah Islam Terhadap Tanggung Jawab Fakir Miskin dan Anak Terlantar | 76 |
| B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Fakir Miskin dan Anak Terlantar..... | 79 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Rekomendasi | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”** untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan¹
2. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²
3. Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada

¹Petra Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Modern English Press,1999), h. 61.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam arti hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan .³

4. Pemeliharaan adalah proses, cara perbuatan, memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan.⁴
5. Fakir adalah orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin.⁵
6. Miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin orang-orang yang sangat berkekurangan.⁶
7. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. seorang anak dapat dikatakan sebagai anak terlantar anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau meninggal dunia sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya.⁷

³Muhadam Abolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), h.22.

⁴*Ibid.*, h. 1478

⁵*Ibid.*, h. 679

⁶*Ibid.*, h. 1053

⁷Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

8. Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, beberapa penerapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bermanfaat atau sejalan dengan ajaran Islam.⁸⁹
9. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁰

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “ Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif” adalah sebagai berikut:

1. Secara objektif, Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dimana pada tanggung jawab itu sendiri jika dikaitkan dengan dalam dunia pemerintahan dan hukum sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang wajib menerima hak dan kewajiban.
2. Secara Subjektif
 - a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Siyasah.

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana 2016), h. 2.

⁹I. Gede Panjth Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Diindonesia* (Bandung: PT. Alumi, 2008), h. 56.

¹⁰Ahmad Sukarja Syarief Ibnu Mular, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqh, dan Qonun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86.

- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi.
- c. Pembahasan ini belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Syariah dan jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasar untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya¹¹. K bertens telah membedakan tanggung jawab itu atas tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sementara yang tidak langsung berarti seorang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

Di Indonesia perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar masih sangat kurang diperhatikan. Walaupun telah banyak berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial namun, dibalik itu masih belum terpenuhinya tanggungjawab terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Perlindungan dan pemeliharaan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹¹Franz Magnis-Susseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisus, 1987), h. 24.

¹²K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 125.

deskriminasi. Upaya perlindungan dan pemeliharaan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan dengan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, dijadikan pekerja anak, ditelantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang atau konflik bersenjata. Demikian juga negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*torture*) terhadap anak (UNICEF, 1999). Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum¹³

Kondisi ini disebabkan karena perhatian yang selama ini diberikan hanya sebatas tampilan fisik saja. Padahal di balik tampilan fisik itu ada kondisi yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: krisis ekonomi, hukum yang berlaku, moral dan sebagainya.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan,

¹³Romli Atsasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 160.

hilangnya kasih sayang sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif bahkan yang lebih miris lagi adalah anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda karena tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi (cerai).

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tuntas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak terlantar anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau meninggal dunia sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya.¹⁴

Fakir miskin menurut Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat, bahwa kedua golongan itu sama. Tetapi pendapat Jumhur, justru berbeda. sebenarnya keduanya adalah 1 golongan tapi satu macam .yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan ¹⁵. Orang yang disebut fakir adalah mereka yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi separuh dari kebutuhannya, jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang yang ia dapat menafkahkan untuk diri

¹⁴Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Hasyiah Dasuqi, jilid 1.h.492; Syamngrah al-Azhar,jilid 1. h.509.

sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, islam juga sangat menganjurkan pemeluknya untuk megasihi fakir miskin. Jika kita menelaah lebih jauh tentang hakikat fakir miskin, pasti kita akan berusaha untuk dapat membantu mereka. Para fakir miskin saat di akhirat banyak sekali yang masuk surga, tentunya mereka yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.¹⁶

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi hal pokok anak, dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarnya hingga anak tersebut dewasa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.¹⁷

Anak terlantar menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya¹⁸

¹⁶Ibtihadj Musyarof, *dasyatnya menyangtuni anak yatim dan fakir miskin* (Jakarta: Platnium, 2013), h. 18.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.189.

¹⁸H. Muladi, *hak asasi manusia hakekat, konsep implikasi dalam perpektif hukum dan masyarakat* (Bandung PT. Refika Aditama, 2005), h .231.

Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945, jika dilihat dari berbagai media bahwa penertiban anak terlantar tidak berlandaskan dengan nilai kemanusiaan, mereka dipaksa bahkan sampai mereka merasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, dengan demikian tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan orang fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia belum sesuai dengan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai serta norma yang berlaku.

Persoalan terhadap tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar masih kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian perlu adanya penelitian secara mendalam terhadap tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar di analisis perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar yang ditinjau dari Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah dan hukum positif yaitu UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yaitu tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Positif ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar
2. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar

G. Signifikansi/ Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum, agar tetap hidup dan berkembangnya khususnya tentang fakir miskin dan anak terlantar.
- b. Secara Praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar serta untuk memenuhi syarat akademik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹.

2. Sifat Penelitian

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan pendekatan berfikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum. Adapun bentuk penelitian pustaka adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁰ Menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Hukum primer

Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang berasal dari Al-Quran, Hadist, dan pendapat para ahli, dan Undang-

¹⁹Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

²⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 5.

Undang Dasar, beserta Undang-Undang Dasar, beserta Undang-Undang yang berhubungan dengan kajian tentang tanggung jawab terhadap pemeliharaan orang fakir miskin dan anak terlantar perspektif Hukum positif dan Fqih Siyasah.

b. Hukum sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Bahan bahan sekunder diperoleh oleh referensi, buku-buku, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

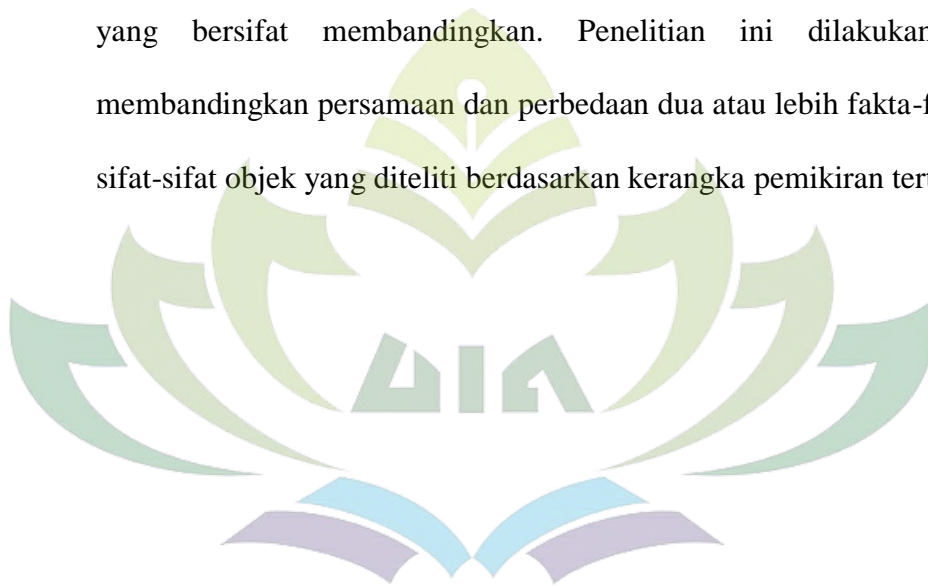
- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-

Qur'an dan Hadist, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.

- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif Dengan pendekatan berfikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.



²¹*Ibid*, h .107.

BAB II

KAJIAN TEORI UMUM TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

a. KAJIAN TEORI

1. Fakir Miskin

a. Pengertian Fakir Miskin

Pengertian Kemiskinan Secara harfiah menurut Poerwadarminta (1976), kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya “tidak berharta benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat digambarkan sebagai suatu kondisi tidak mampu baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi yang seperti ini biasanya ini rentan sekali terhadap timbulnya masalah sosial yang lain.

Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum, adapun

Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Friedman (1992) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya.

Akan tetapi, Brendley (dalam Ala,1981) mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim (dalam Ala,1981) yang mengatakan bahwa kemiskinan yang biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Ensiklopedia internasional Meriam Webster (1990), mendefinisikan “*poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount in wellbeing*”. (kemiskinan adalah istilah untuk kekurangan dalam kesejahteraan).

Narayan (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: miskin ini ditandai dengan ketiadaan kekayaan serta kemampuan, kekayaan harta, kesehatan integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam arah politik.

Berbagai definisi yang disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa keadaan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum mereka.

Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang tidak bekerja serta banyak juga warga yang belum mampu

mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²²

b. Perbedaan Makna Fakir dan Miskin

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap fakir miskin. karena ini adalah merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”²³. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Fakir dan miskin merupakan dua kata yang berbeda makna menurut buku-buku istiah dalam bahasa Arab. Al-Sa’dly, mengutip surah AT-Taubah menjelaskan bahwa fakir miskin merupakan kata yang berdiri sendiri-sendiri, terkadang bisa bermakna fakir dan terkadang bisa bermakna miskin, tetapi apabila disebutkan secara bersamaan, maka fakir miskin dikatakan lebih rendah daripada miskin.²⁴

Selanjutnya Al-Jarullah mengutip pendapat imam Syafii bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang

²²Muhidin Syarif, *Masalah-masalah sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.1.

²³ Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Pasal 34 ayat (1).

²⁴ Suharto edi, *kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Jakarta: alfabeta, 2009), h.3.

layak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan lainnya bagi dirinya maupun orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lebih lanjut mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari nisab dan bahkan berhak mendapatkan zakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Al-Ghaziy, kemiskinan digolongkan menjadi dua, yaitu orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja, tetapi jika di hitung dari penghasilan hanya bisa memenuhi sebagian dari (sekitar 50%-70%) kebutuhan hidupnya. Sehingga seorang fakir adalah orang miskin yang paling rendah, sedangkan orang miskin adalah orang yang berada di bawah garis rata-rata kehidupan masyarakatnya, bahkan orang miskin memiliki kewajiban membayar zakat kalau pendapatannya sudah mencapai nisabnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2011 kedua kata tersebut tidak memiliki makna yang berbeda, tetapi menjadi 1 maka yang sama dengan menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan mereka serta keluarganya.

Kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2011 meliputi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan dan atau keutuhan pelayanan sosial. Semua kebutuhan dasar fakir miskin itu seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara sesuai konstitusi.

c. Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta benda dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya yang bermakna akses ruang public dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin yaitu:

1. Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Tidak mampu berusaha karena sakit dan cacat fisik atau mental.
3. Tidak mampu berfungsi social.
4. Rendahnya sumber daya manusia.
5. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun masa.
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain).

8. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.²⁵

d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Penyebab kemiskinan banyak ragamnya tergantung pada kondisi demografis, sosiografis dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh Coombs (Ahmad 1980) mengatakan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan dan (3) pekerjaan. Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan dan sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan, asal mula kemiskinan seperti di bawah ini:

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang mereka dalam keadaan sudah miskin, kelompok masyarakat seperti ini menjadi miskin karena tidak mempunyai sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita disebut sebagai "*persiten poverty*", yaitu

²⁵*Ibid* , h.4

kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.

2. Kemiskinan Struktual

Kemiskinan struktual adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tataan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir (1997), munculnya kemiskinan struktual disebabkan oleh karena upaya menanggulangi kemiskinan natural.

Masalah kemiskinan tersebut di atas tersebut sebagai suatu lingkaran setan kemiskinan yang meliputi enam unsur, yaitu: keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat., Chamber (1983) yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya disebut "*deprivation trap*" atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsure yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Kelemahan jasmani
- c. Isolasi
- d. Kerentanan dan,

e. Ketidak berdayaan

Indikator Kemiskinan, Indikator lain oleh BPS (1999) adalah kecukupan makanan/kalori menggambarkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluarannya tidak dapat memenuhi kecukupan konsumsi makanan mereka setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa yang sekarang dijabarkan kedalam penetapan upah minimum dan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak dari masing-masing wilayah.²⁶

Kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh BKKBN, yaitu keluarga prajahtera dan sejahtera. Disebut keluarga prasejahtera apabila tidak bisa memenuhi beberapa syarat indikator dan sementara yang disebut keluarga sejahtera dapat memenuhi semua indikator tersebut.

Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di pakai di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian maupun lainnya.

²⁶Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.7.

- c. Rumah yang mereka tempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
- d. Bila ada anggota keluarga sakit di bawa kesarana kesehatan.
- e. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f. Semua anak umur 7-15 tahun bersekolah.

Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan Menurut Soetarso (1992: 22) pekerjaan sosial merupakan suatu usaha perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar, dengan sengaja dan bertujuan, *international Federation of Sosial Workers* (IFSW) pada tahun 2001 mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut :

“profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan relasi kemanusiaan dan pemberdayaan dan pembebasan setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemanfaatan teori-teori dari perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Berprinsip pada hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah sesuatu yang fundamental bagi pekerjaan sosial.

Melihat dari sisi peran dan tujuan permasalahan, maka Pierson dan Thomas (2002) mengartikan profesi pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Kegiatan profesi membayar yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan yang serius dalam kehidupan mereka didalam memberikan perawatan, perlindungan atau konseling melalui dukungan sosial, advokasi dan bekerja bersama masyarakat”

Adapun menurut Oke (2008), pekerjaan sosial diartikan sebagai berikut:

“sebuah kegiatan profesional berbayar yang bekerja langsung dengan orang dewasa dan anak-anak untuk membantu mereka mencoba dan menyelesaikan kesulitan praktis dan interpersonal dalam rangka memungkinkan mereka untuk berfungsi dan berpartisipasi secara lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan secara individu atau dalam keluarga dan bekerja dengan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kompetensi mereka antar sosial atau pribadi melalui penyediaan berbagai layanan penggunaan kekuatan mengendalikan hukum yang akan semakin mendukung proses peralihan.

e. Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan oleh berbagai hal baik dari diri pribadi individu maupun dari faktor di luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya. Pada tahun 1971, Sajogyo mengusulkan mengukur kemiskinan dengan

pendekatan kemiskinan absolute. Cara yang dikembangkan adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin yaitu (i) golongan paling miskin dan mempunyai pendapat perkapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang (ii) golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240 kg hingga 360 kg, dan (iii) golongan miskin yang memiliki pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg.²⁷

Sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagaimana dikemukakan oleh Soetarso (1992: 6) dimana pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas menyelesaikan satu atau lebih fungsi dari praktik pekerjaan sosial, antara lain adalah di bawah ini :

1. Membantu orang yang meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.
2. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan di antara dengan sistem sumber.
3. Mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan baru di antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan.

²⁷Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), h. 121.

4. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan di antara orang-orang di lingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijaksanaan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber materi.
7. Bertindak sebagai kontrol sosial.

Pendekatan Kesejahteraan Sosial Amartya Sein (1987) mengartikan pendekatan kesejahteraan sebagai berikut:

“bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan kunci, dan juga tidak memperoleh pendapatan atau pendidikan yang memadai, atau kesehatan yang buruk atau tidak aman, atau kurang percaya diri, atau merasa tidak berdaya serta tidak adanya kebebasan untuk berbicara.”²⁸

Dari pengertian di atas, maka Homan (2008:60-61) menjelaskan tiga pendekatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di antaranya melalui pendekatan *residual*, *institutional* dan *development* :

1. Pendekatan *Residual* adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang menyediakan jaring pengaman sosial kepada individu dan keluarga sebagai pelayanan tambahan untuk

²⁸Rustanto Bambang, *Pekerjaan Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia* (Bandung: STKS Press, 2010), h. 12.

membantu individu-individu yang mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi.

2. Pendekatan *institutional* adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang merespon untuk saling berbagi dalam kondisi sosial.
3. Pendekatan *Development* adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang berupaya membuat hidup lebih baik dengan meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi indeks pembangunan manusia, tetapi belum tentu mampu menangani permasalahan dan membantu mereka yang dalam kesesusahan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada masyarakat membentuk lembaga kesejahteraan sosial yang membuat hidup menjadi lebih baik, berupaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia. Program PNPM Mandiri, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH).²⁹

f. Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan

1) Penduduk Miskin Perdesaan

Menurut BPS (2010) dari 225 juta penduduk Indonesia ada seleksi 65% penduduk tinggal di daerah perdesaan dan sisanya di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia lebih dari 136 ribu desa. Rata-rata mempunyai pekerjaan seperti bertani,

²⁹Rukminto Adi, Isbandi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002, h. 14.

masyarakat desa terbagi dalam pertanian ladang dan pertanian sawah. Walaupun masyarakat desa mayoritas adalah petani, jumlah petani saat ini sebanyak penduduknya.

a) Desa dan Lembaga Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan untuk pembangunan desa adalah:

1. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

Adapun lembaga perangkat desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan dan pembangunan. Lembaga perangkat desa terdiri dari bagian-bagian berikut:

b) Badan Permusyawaratan Desa

BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang mempunyai fungsi: (1) membahas dan menyepakati

rancangan peraturan desa bersama kepala; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c) Kepala Desa dan Kemasyarakatan Desa

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh unsure perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, dan seksi pemerintahan desa serta pemimpin teknis kewilayahan seperti kepala dusun atau kampung.

d) Ciri Kemiskinan Perdesaan

J.A Bernes Koentjanigrat (1984) melaporkan bahwa orang miskin di desa memiliki ciri berbasis agraris di mana sebagian besar penduduk desa bermata pencarian sebagai petani, artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah berbasis agraris:

1. mayoritas hubungan sosial dikaitkan dengan lapangan hidup pertanian baik dalam keluarga kerabat, tetangg, kenalan, dan kemasyarakatannya.

2. Banyaknya para petani yang mempunyai mata pencarian tambahan dan produk turunan pertanian.
3. Banyak petani yang pada masa-masa menunggu panen, mereka merantau ke kota untuk bekerja menjadi buruh bangunan atau proyek pembangunan infrastruktur.
4. Loyalitas masyarakat masih berorientasi pada orang-orang dan kelompok pada desanya (*bounding social capital*).
5. Loyalitas etnik orang desa akan sangat erat kaitannya dengan suku bangsa atau daerahnya, dan adanya pendatang dari suku lain di anggap sebagai minoritas yang harus ikut dengan adat istiadat dari suku mayoritas.³⁰

2) Definisi Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan sebagai masalah yang multidimensi, Menurut Nadvi dan Barrientos (2004) sebagai berikut:

“Kemiskinan juga semakin di akui sebagai masalah multidimensi yang melibatkan lebih dari sekedar perampasan pendapatan, tetapi juga kurangnya kebebasan, meningkatnya kerentanan, resiko, dan ketidakberdayaan”

³⁰ Setiadi, *Ilmu Dasar Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kencana, 2009), h .87.

Suparlan (2004) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut.

Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan miskin (rumah di perkampungan miskin dan kotor, serta perkampungan dengan sedikit pelayanan sosial) upah rendah dan tidak tercukupinya peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja informal, meskipun, riset menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, disamping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat dimana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya melalui pendidikan anak-anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati atau hemat.

a) Batasan Kemiskinan Perkotaan

Adapun batasan tentang kemiskinan kota atau lazim disebut sebagai garis kemiskinan sebagaimana di

kemukakan oleh Elly dan Usaman (2011), garis kemiskinan sebagai ukuran untuk menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukn,
2. Posisi manusia dalam lingkugan sekitar, dan
3. Kebutuhan objektif manusia untuk hidup manusiawi.

Bappenas (2013) mengidentifikasikan kemisknan perkotaan dari rendahnya akses terhadap berbagai sumber daya dan asset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar dimna sumber daya dan asset produktif tersebut, maka barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermatabat.

Berdasarkan pendapat Suharto (2009;16), ada 9 kriteria yang menandai kemiskinan perkotaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).

- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal).
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan, dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam (ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air).
- e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).

b) Bentuk Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan secara sosial ekonomis memiliki 2 bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative sebagaimana dikemukakan oleh Baswir dan Sumodinigrat dalam Elly dan Usman (2011) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kemiskinan *absolute* adalah kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2. Kemiskinan *relative* adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya.

c) Penyebab Kemiskinan Perkotaan

Berkaitan dengan kemiskinan budaya sebagaimana budaya sebagaimana dikemukakan oleh Norton dan Hunt dalam Astrid Susanto (2008) masyarakat di bagi dalam 3 kelompok besar berdasarkan sikap sosialnya terhadap kemungkinan memperbaiki nasib diri. Ketiga kelompok itu adalah sebagai berikut

1. Kelompok atas yang tidak/kurang ada perhatian untuk naik lebih tinggi dalam tangga sosial, mengingat bahwa hal tersebut telah mereka capai. Bagi kelompok ini masalah prestasi menjadi masalah yang di nomorduakan.
2. Kelompok yang masih mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf dan tingkat sosialnya walaupun tergolong golongan yang miskin.
3. Kelompok karena tercekam oleh kemiskinan mempunyai nilai untuk mengutamakan hasil dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pandangan menuju ke hari di masa mendatang.³¹

³¹Sajogjo, *Ekologi Perdesaan Sebuah Bunga Rampai* (Bogor: Rajawali, 1982), h. 93.

2. Anak Terlantar

a. Pengertian Anak

Anak merupakan penyambung keturunan sebagai investasi masa depan dan anak adalah harapan untuk menjadi sandaran untuk pada usia lanjut, dan anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat merubah status sosial orang tuanya.³² Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat ini :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

b. Pengertian anak terlantar

Anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk kategorikan anak-anak rawan yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar yang dikeluarkan Dinas Sosial provinsi Jawa Timur (2001) disebut bahwa yang dikatakan anak terlantar yaitu anak yang dikarenakan suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik, secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau

³²Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Peristiwa Beda Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 20018), h. 5.

kedua orangtuanya, tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua karena ketidakmampuan ataupun karena kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya mereka umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantarkan anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, selokan di tempat-tempat sampah, dan sebagainya. Bai karena ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.³³

c. Ciri-ciri Anak terlantar

- 1) Mereka biasanya berusia 5-18 Tahun, dan merupakan anak yatim, piatu atau anak yatim piatu
- 2) Anak yang terlantar sering kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks diluar nikah lalu mereka tidak ada yang mengurus sehingga orang tua mereka tidak siap baik secara psikologis maupun secara ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

³³Irwanto Muhamad Farid, Jeffry Anwar, *Anak yang Membutuhkan Perindungan Khusus di Indonesia* (Jakarta: Kerja sama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen sosial, dan UNICEF, 1999), h. 184.

- 3) Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak cenderung rawan diperlakukan salah.
- 4) Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya.³⁴

d. Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar

Sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi anak-anak terlantar di lingkungan komunitas miskin. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah: dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) keluarga, kerabat dan komunitas sosial di sekitarnya. Berikut ini beberapa faktor penyebab yang dihadapi anak-anak terlantar:

- 1) Akibat krisis kepercayaan pada arti sangat pentingnya sekolah, di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup menguntungkan sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih untuk mempersiapkan untuk bekerja di sektor publik.

³⁴Suyanto Bagong, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Upaya Pemantaannya* (Surabaya:Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000), h. 195.

- 2) Akibat kekurangan mengertinya tentang pola perawatan kesehatan yang benar, dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan ketika sakit sering sekali ditelantarkan. Di kalangan orang tua, kebiasaan merokok, ngopi, dan kebutuhan orang tua justru sering kali didahulukan, mekipun disaat yang sama dana yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak mereka
- 3) Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diberlakukan salah, dan bahkan sering terjadi objek tindak kekerasan
- 4) Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam pergaulan yang salah.
- 5) Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara intens atau aktivitas keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya lebih mampu mengatasi tekanan sosial dan psikologi yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya
- 6) Di tengah kehidupan kota besar setempat dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak yang terlantar umumnya tidak banyak berkembang. Bahkan ada kecendrungan

perlakuan kerabat dan lingkungan komunitas lokal terhadap anak-anak terlantar bukan saja tidak peduli akan tetapi mereka terkadang juga menjadi bagian dari pihak yang memperlakukan anak secara tidak baik.

- 7) Apa yang menjadi kebutuhan sosial anak terlantar, sebenarnya bukan hanya memberi kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga cara yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama dengan kesehatan dan pendidikan yang optimal.

3 Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan, tekyan arek, kere, anak gelandangan atau kadang juga disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka merupakan anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat, disudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara sosial kurang atau bahkan tidak bisa diterima dimasyarakat umum, sekedar hanya menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang juga mereka disebut sebagai pengganggu ketertiban. Mereka cukup beragam dan dapat

dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orangtua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya (Farid,1998). Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk. (eds.), 1997).

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka, sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orangtuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini yaitu untuk membantu memperkuat ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

Kedua, *children of street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya. Banyak di antara mereka menjadi korban tindak kekerasan leri atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak ini

mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resiko yang akan mereka hadapi.³⁵

b. Anak Jalanan

Anak jalanan terdiri atas laki-laki dan perempuan pada umumnya yang sering mempunyai masalah dalam kehidupannya saat mereka sudah berada di jalanan adalah anak jalanan perempuan karena mereka rentan sekali untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang di sekelilingnya. Menurut Jefri Anwar dari mitra masyarakat kota, Jakarta resiko utama yang sering dihadapi anak jalanan perempuan yaitu perlakuan tak senonoh, berupa pelecehan seksual sampai kehilangan keperawanan karena diperkosa oleh anak lelaki yang lebih besar atau orang dewasa yang ada disekitarnya, bahkan menurut Desti Murdiana dari lentera PKBI Yogyakarta tidak jarang anak jalanan perempuan itu mengalami perlakuan tidak baik pada saat mereka masih usia belia. Ada kecendrungan anak perempuan lebih mudah di eksploitasi dan terdorong untuk memasuki dunia prostitusi direkrut menjadi pekerja seks komersial. Menurut Desti Murdijana (1998) tidak jarang anak jalanan perempuan yang terlanjur hamil harus menyabung nyawa, karena mereka memilih menyelesaikannya dengan cara aborsi yang jauh dari prasyarat kelayakan medis, pada batasan tertentu memang

³⁵Tjandraningsih, Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak Studi Mengenai Pendamping Pekerja Anak* (Bandung: AKATIGA, 1995), h. 114.

anak jalanan perempuan akan mencoba menggunakan obat-obatan tertentu termasuk cola-cola untuk mencegah kehamilan.³⁶

c. Problem Kehidupan Anak Jalanan

Sejak di keluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik pertama pemerintah terhadap problematika anak. Untuk mempertahankan hidup di tengah kehidupan kota yang sangat keras anak jalanan biasanya dapat melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal, baik yang legal maupun ilegal di mata hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak dalam kriteria eksploitasi sehingga mereka dapat kehilangan haknya yang disebabkan karena jam kerja yang sangat panjang dengan standar upah yang kurang jelas hilangnya untuk mendapatkan pelajaran di sekolah dan bermain dan tidak mempunyai peluang untuk libur terkadang mereka yang tinggal pisah dengan orang tuanya dan keluarga banyak kemungkinan mendapat resiko perlakuan buruk secara psikologi, fisik dan seksual oleh majikan mereka sendiri.³⁷ terkadang ada di antara mereka bekerja menjadi pedagang asongan di kereta api maupun bus kota, menyemir sepatu, mencari bahan bekas atau sampah, mengamen di pertigaan maupun perempatan lampu merah dan sering juga mereka terlibat kepada

³⁶Irwanto, Muhammad farid, Jeffry Anwar, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Indonesia:Analisa Situasi* (Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya Departemen Sosial dan UNICEF,1999), h. 116.

³⁷Farhana, *Apek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h, 41.

jenis pekerjaan berbau kriminal seperti mencuri, bahkan menjadi bagian dari pada perampok.³⁸

Tabel 2.1 Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan

| Aspek | Permasalahan yang diHadapi |
|-------------------------------------|---|
| Pendidikan | Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan |
| Intimidasi | Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain atau petugas razia |
| Penyalahgunaan obat dan zat adiktif | Ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya |
| Kesehatan | Rentang penyakit kulit, PMS, Gonorrhoe dan paru-paru |
| Tempat tinggal | Umumnya disebarkan tempat, di gubuk-gubuk atau di permukaan kumuh |
| Hubungan dengan keluarga | Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan |

³⁸*Ibid*, h .117

| | |
|---------|--|
| Makanan | Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah, kadang beli |
|---------|--|

Adapun masalah yang dihadapi lainnya ialah khususnya perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi hampir semua Negara-negara di Asia Tenggara, masing- masing Negara memiliki factor tersendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak yaitu sebagai berikut:

1. Anak- anak menikah muda atau perceraian
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
3. Kemiskinan dan putus sekolah
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih
5. Melayani petugas polisi atau militer
6. Kelas menengah yang bekerja
7. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah
8. Krisis dalam negeri
9. Dipaksa oleh keadaan
10. Upah yang sangat minimum
11. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. Perilaku seksual terbuka
13. Penghargaan social.
14. Kebutuhan anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestic terutama mengasuh atau merwat orang tua

15. Sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat.³⁹

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan topic penelitian yang dilaksanakan Tinjauan Pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang di gali mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi di lakukannya penelitian.

Berikut ini saya paparkan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian saya di antaranya yaitu:

1. “Analisis Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Oleh : Muhammad Jamroji

Hasil penelitian, “di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap memberikan perlindungan kepada gelandangan, pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah ada. Baik hukum positif dan islam juga menjelaskan bahwa keberadaan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak bagi orang tua, pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tidak lain digunakan

³⁹Amihan Abueva, *Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/Center for Studi and Child, Protection in collaboration with UNICEF* (Jakarta: Kalingga, 2004), h. 70.

untuk pengentasan dengan berkurangnya kemiskinan yang ada. Di antaranya adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin yang tidak lain tujuan hal tersebut digunakan demi untuk memberikan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar yang ada demi mewujudkan individu-individu yang sejahtera”.

2. “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Social Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Social Kabupaten Goa)”. Oleh: Andi Resky Firadika.

Hasil penelitian, ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat di sebabkan oleh dua factor yaitu factor kemiskinan dan factor berasal dari keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis. Berdasarkan pasal 34 undang-undang 1945 dinas social kabupaten goa telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak telantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak telantar serta menitiplan anak ke LKSA, dan melakukan pendampingan anak terlantar. Akan tetapi upaya yang dilakukan belum efektif, dikarenakan beberapa panti asuhan tutup karena kurangnya anggaran dana, kurangnya pekerjaan social.

3. “Pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di kota Makassar”.

Hasil penelitian ini bahwa pemenuhan hak konstitusiional bagi fakir miskin dan anak terlantar daam bidang pendidkan di kota makassar yaitu dengan kehadiran program keluarga harapan (PKH) bahwa dengan

program PKH di pandang dapat meminimalisir fakir miskin dan anak terlantar di bidang pendidikan, bentuk tanggung jawab dinas social adalah dengan memfasilitasi keluarga miskin dengan memberikan modal kecil dan meningkatkan kesejahteraan yang merupakan bentuk tanggung jawab dinas social kota Makassar dalam pemenuhan hak konstitusiaonal fakir miskin dan anak terlantar di kota Makassar biasanya factor dari mainset fakir miskin tidak sampai pada tahap menuju perkembangan dan kemajuan. Mereka selalu berfikir untuk tetap bagaimana caranya menghasilkan uang bukan focus kepada pendidikan serta paradigma orang tua itu yang sama sekali tidak mendorong anaknya untuk mengenyam pendidikan.

Dengan demikian dari beberapa skripsi di atas kesamaan topic dengan penelitian yang di lakukan dalam ini yaitu sama-sama membahas tentang fakir miskin dan anak terlantar. Dalam penulisan sebelumnya hanya menggunakan teori penanganannya, berbeda dengan penelitian yang penulis teliti dimana penelitian penulis ini lebih membahas tentang tanggung jawab pemerintahannya yang berdasarkan fiqh siyasah dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Abdul Qadir, Audah, *Al-Islam wa Audha una Al-Siyasah*. Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978.
- Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sukarja, Syarief Ibnu Mugar, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, Dan Qonun)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amihan Abueva, *Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/Center for Studi and Child, Protection in collaboration with UNICEF*, Jakarta: Kalingga, 2004.
- Baihaqi Mif, *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisus, 1987.
- Farhana Apek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gede Panjth Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: PT Alumi, 2008.
- H. Muladi, *hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Implikasi Dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat)*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundanan, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibtihadj Musyarof, *Dasyatnya Menyangtuni Anak Yatim dan Fakir Miskin*, Jakarta: Platnium, 2013.
- Ilhami Bisri, *System Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Imam Sukandi, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak*" Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 5. No.2 , Desember 2013.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Irwanto Muhamad Farid, Jeffry Anwar, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia*, Jakarta: Kerja sama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen sosial, dan UNICEF, 1999.

Irwanto, Muhammad farid, Jeffry Anwar, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Indonesia Analisa Situasi*, Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya Dapartemen Sosial dan UNICEF, 1999.

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Moehamad taufik makarao, weni bukamo ,syaiful azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Renika Cipta, 2013.

Muhadam Abolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad Syaltout, *Al-Islam 'Aqiedah Wa al-Syariah*, Darul Qalam, 1996.

Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukum fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1997.

Muhammd Syaifudin dan Mada Apriadi Zuhir, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Local: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Sipil Dan Politik Warga Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1999.

Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Petra Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English. Press , 1999.

Ranny Kautan, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2006.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandiri Maju, 1997.

- Romli Atsasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Rukminto Adi, Isbandi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002.
- Rustanto Bambang, *Pekerjaan Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*, Bandung: STKS Press, 2010.
- Sajogjo, *Ekologi Perdesaan Sebuah Bunga Rampai*, Bogor: Rajawali, 1982.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Depok: PT Grafindo, 2017.
- Setiadi, *Ilmu Dasar Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Peristiwa Beda Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Peristiwa Beda Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan : UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Suyanto Bagong, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Upaya Pemantaannya*, Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000.
- Tjandraningsih, Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak Studi Mengenai Pendamping Pekerja Anak*, Bandung: Akatiga, 1995.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2007.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.